

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Sektor bisnis yang berkembang merupakan indikator yang jelas dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dari perusahaan besar hingga perusahaan mikro dan kecil. UMKM merupakan landasan perekonomian Indonesia dan sumber ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Mereka dapat mengatasi resesi dan menyediakan jaring pengaman bagi komunitas mereka. UMKM memberi peran penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia karena mereka mempekerjakan begitu banyak orang dan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2010-2011, pemberdayaan UMKM sangat perlu karena fakta bahwa UMKM mempunyai potensi yang besar untuk menjadi sumber pendapatan dan berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraannya.

Masih terdapat kendala bagi pelaku UMKM, dan ini paling terlihat dalam hal penyaluran kredit dari bank ke UMKM. UMKM sering dikaitkan dengan masalah isu bisnis, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Ketika UMKM tumbuh dengan cepat, mereka menghadapi tantangan baru, termasuk dalam laporan keuangan.

Individu dalam peran manajemen keuangan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal dan jujur. Terlepas dari pentingnya laporan keuangan dalam membantu pemilik usaha dalam membuat keputusan manajerial, sebagian besar UMKM belum memiliki informasi akuntansi yang paling dasar, dan juga pengusaha UMKM

sebagian besar belum memakai akuntansi yang relevan bagi keadaan bisnis mereka. Hal ini membuat sulit untuk mengukur keberhasilan masing-masing UMKM.

Beberapa penelitian telah memaparkan bahwa UMKM di Indonesia menderita sistem keuangan yang tidak memadai yang tidak dipahami atau diterapkan oleh manajemen puncak. Pemilik UKM sering percaya bahwa akuntansi tidak diperlukan atau berguna, dan bahwa itu adalah pengurasan yang signifikan pada sumber daya untuk dieksekusi. Sebagian besar pemilik usaha UMKM paling peduli pada satu hal: bagaimana memaksimalkan keuntungan dengan sedikit usaha dan tanpa akuntansi. Kurangnya pengetahuan akuntansi, lemahnya dalam menerapkan pembukuan akuntansi, keuangan yang tidak memadai untuk mempekerjakan akuntan, dan kurangnya aturan yang mengharuskan pembuatan laporan keuangan untuk UMKM semuanya berkontribusi pada rendahnya tingkat praktik akuntansi di Indonesia di kalangan UKM negara. Kurangnya mandat pembuatan laporan keuangan bagi UMKM menjadi penyumbang utama rendahnya tingkat pembuatan laporan keuangan. Aturan akuntansi keuangan yang seharusnya diikuti saat membuat laporan keuangan harus diikuti secara konsisten.

Di Indonesia, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sangat didukung oleh IAI. SAK-EMKM disahkan oleh DSAK pada pertemuannya pada 18 Mei 2016 dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2018. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat mewujudkan UMKM yang mandiri, modern dan maju. Untuk mengakomodasi persyaratan khusus UMKM untuk pelaporan keuangan, dibuatlah SAK-EMKM. Sebanyak 57,9 juta UMKM di Indonesia mendapatkan manfaat dari penyederhanaan EMKM dari persyaratan pelaporan keuangan Indonesia. Jika disandingkan dengan SAK-ETAP, standar akuntansi keuangan SAK-EMKM jauh lebih kompleks. SAK-EMKM, misalnya, memungkinkan UMKM untuk dengan mudah melacak aset, kewajiban, dan biaya akuisisi mereka karena hanya didasarkan pada penilaian biaya historis.

Suatu entitas diwajibkan untuk mewajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan akuntansi. Menerapkan pencatatan akuntansi masih menjadi tantangan tersendiri terutama bagi pelaku usaha UMKM karena kurangnya keterampilan akuntansi, kompleksitas proses pencatatan akuntansi, kelangkaan SDM, keyakinan bahwa laporan keuangan tidak terlalu penting bagi pelaku usaha, dan tidak adanya regulasi yang mengharuskan mereka menyusun laporan keuangan.

Masalah dengan akuntansi, yang masih sangat mendasar; praktik mendokumentasikan pesanan klien dan penjualan bulanan saja; tidak adanya manajemen catatan akuntansi, yang merupakan sumber daya penting untuk memahami evolusi perusahaan; ini semua adalah masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Implementasi buku akuntansi penghasil laporan keuangan masih menjadi tantangan bagi UKM.

Dalam sebuah studi tahun 2017 (Kadek, Nyoman, & Putu), Banyak individu di Indonesia berutang pekerjaan dan kemampuan mereka untuk mencari nafkah bagi UMKM. UMKM memegang peranan krusial sebagai salah satu motor kunci pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, inisiasi pengembangan yang kontinue haru dilaksanakan untuk memastikan bahwa UMKM tidak hanya meningkat dalam segi kuantitas tapi juga kualitas dan persaingan produk yang dipasarkan.

Pemberdayaan UMKM secara strategis penting karena peran penting yang mungkin mereka mainkan dalam mendorong kegiatan ekonomi lokal dan memberikan pendapatan penting bagi banyak orang. Kemampuan menghadapi badai merupakan kekuatan utama UMKM. UKM di Indonesia telah menunjukkan ketahanan dalam menghadapi kesulitan ekonomi, menyelamatkan ekonomi negara melalui krisis keuangan 1997 dan krisis keuangan global 2008. Diharapkan kehadiran UMKM akan berkontribusi signifikan dan baik terhadap upaya penanganan masalah

tersebut. Mengingat laju pembangunan ekonomi nasional dan banyaknya lapangan kerja baru yang tercipta, maka bantuan yang diberikan oleh UMKM di tengah krisis ekonomi dapat dilihat sebagai bantuan dalam proses pemulihan ekonomi nasional.

Pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional tidak dapat diperdebatkan ketika seseorang mempertimbangkan peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, menentukan PDB, meningkatkan ekspor, dan meningkatkan hasil investasi. Terjadi peningkatan kontribusi sektor UMKM terhadap PDB dari 57,84% menjadi 60,34% selama lima tahun terakhir, menurut berita industri yang dipublikasikan di situs web Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Industri UMKM juga berperan dalam pasar tenaga kerja rumahan. Persentase pekerja yang tersedia yang benar-benar dimanfaatkan di sektor UMKM naik dari 96,99 menjadi 97,22 persen selama lima tahun sebelumnya. Sektor UMKM berposisi sebagai pilar pendukung ekonomi yang besar dalam hal pendapatan daerah dan prospek kerja karena kontribusi besar yang diberikan UMKM terhadap pasar lokal dan ekspor, yang menghasilkan pendapatan mata uang asing bagi Negara (Subramanian dan Nehru, 2012).

Namun, meskipun ekspansinya cepat, UMKM masih berjuang untuk bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Meningkatnya persaingan merupakan hasil dari pesatnya pertumbuhan UMKM. Tingkat pengembalian yang dicapai cenderung menghasilkan situasi di mana pengeluaran produksi setara dengan pendapatan yang diterima karena persaingan menjadi lebih ketat. Akan selalu ada tempat dalam bisnis untuk yang menang, dan industri kecil yang tidak dapat bersaing akan didorong keluar. Manajemen yang efektif, baik dalam hal operasi sehari-hari maupun strategi pertumbuhan dalam terang persaingan global, merupakan tantangan terbesar bagi UMKM.

Selanjutnya, pelaku UMKM menghadapi tantangan dalam melakukan operasional bisnis, yang menghambat pertumbuhan UMKM. Pelaku UMKM di Indonesia menghadapi empat tantangan utama. Untuk memulai, masalah dengan membuat laporan keuangan. Masalah dengan uang dan keuangan berada di nomor dua. Masalah ketiga berkaitan dengan kesulitan dalam mempelajari keterampilan teknologi baru. Masalah lain dalam operasional UMKM adalah pemasaran barang dan jasa mereka.

Pemain UKM menyadari perlunya mendokumentasikan kegiatan bisnisnya. Masalah muncul ketika mencoba untuk melakukan dan mengevaluasi kemandirian berbagai tindakan. Proses akuntansi melibatkan pencatatan perubahan bersih dalam arus kas, yang merupakan perbedaan antara arus kas masuk dan arus kas keluar, terlepas dari apakah kas dihabiskan untuk pengeluaran perusahaan atau pribadi. Pertumbuhan pendapatan dari waktu ke waktu adalah ukuran umum keberhasilan bagi pengusaha yang bekerja dalam skala sederhana. Sebenarnya, pendapatan bukanlah satu-satunya tanda kesuksesan; Kebutuhan untuk melacak dan mengategorikan setiap transaksi, aktivitas, dan upaya terkait sama pentingnya.

Untuk membuat pilihan ekonomi yang terinformasi dan menunjukkan akuntabilitas manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, penting bagi bisnis untuk menyiapkan dan meninjau laporan keuangan yang menilai kinerja keuangan. Meskipun demikian, masih ada kekurangan yang signifikan dalam proses akuntansi keuangan di kalangan UMKM, sebagaimana diuraikan dalam empat kesulitan paragraf sebelumnya. Di mata pelaku UMKM, memperluas jaringan mitra eksternal perusahaan adalah kunci keberhasilan. UMKM akan, misalnya, menjangkau bank dan lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan keuangan. Untuk menentukan layak kredit atau tidak, bank atau lembaga keuangan sering meminta laporan keuangan dari bisnis tersebut.

SAK EMKM disahkan oleh DSAK pada tanggal 24 Oktober 2016, Tujuan SAK EMKM adalah untuk menyelaraskan laporan keuangan UMKM. Tujuan laporan keuangan, sebagaimana didefinisikan oleh SAK EMKM, adalah untuk membantu berbagai pengguna membuat pilihan ekonomi yang lebih terinformasi dengan memberikan transparansi ke dalam situasi dan kinerja keuangan entitas. Kreditor dan investor adalah contoh dari pengguna ini yang memasok sumber daya untuk entitas AS.

Penerbitan SAK EMKM dipandang sebagai faktor kunci dalam meningkatkan akses UMKM terhadap pendanaan sektor perbankan di Indonesia. SAK EMKM diharapkan dapat mengefektifkan proses pembuatan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pertumbuhan UMKM di masa mendatang.

SAK EMKM ini dijalankan dengan baik karena penerbitannya dimaksudkan untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Namun, banyak usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia yang masih belum menyadari keberadaan SAK-EMKM ini, sehingga implementasinya di bawah standar. Di lingkungan provinsi Jawa Timur, salah satunya menjalankan perusahaan yang sukses. (Falah, 2018).

Pada pertengahan tahun 2015, IAI memproduksi SAK Entitas UMKM, seperangkat SAK yang lebih mudah diakses daripada laporan keuangan SAK-EMKM untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari diminta dari SAK-EMKM. Penerapan SAK-EMKM ini membebaskan pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK umum yang bersangkutan. Jika bertentangan dengan persyaratan pelaporan PSAK yang lebih berbelit-belit, SAK-EMKM menawarkan banyak opsi baru untuk bisnis. Dokumen Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki panjang 182 halaman dan dibagi menjadi 30 bab, sedangkan SAK-EMKM memiliki panjang di bawah 100 halaman.

Sesuai SAK-purview, standar EMKM ini dibuat untuk organisasi yang tidak bertanggung jawab. Pemilik yang tidak secara aktif terlibat dalam menjalankan perusahaan, kreditor, dan lembaga pemeringkat adalah contoh pengguna dari luar. Sementara kebijakan EMKM akuntansi SAK lebih santai dengan cara-cara tertentu daripada PSAK, ketentuan transisi yang terakhir lebih liberal.

Usaha yang masuk dalam kategori UMKM memiliki banyak ruang untuk berkembang. Karena sistem manajemen bisnis yang mendasar perusahaan, ada kebutuhan untuk meningkatkan pelaporan keuangan. Selanjutnya, berbagai kendala dalam proses pengumpulan pelaporan keuangan di organisasi yang dimiliki telah menyebabkan penyusunan dan pelaporan keuangan belum dilakukan secara memadai.

Terlepas dari kenyataan bahwa pengukuran dan pengakuan aset, liabilitas, pendapatan, dan pengeluaran dalam SAK-EMKM masih didasarkan pada prinsip dan konsep kerangka dasar yang meresap, beberapa penelitian ditemukan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia belum bisa menerapkan standar akuntansi untuk UMKM, dikarenakan standar akuntansi laporan keuangan yang cukup sulit. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa standar akuntansi yang ada tidak dirancang dengan mempertimbangkan pelaku UMKM dan karenanya tidak memenuhi kebutuhan mereka. Apabila SAK-EMKM telah dimanfaatkan untuk menyusun laporan keuangan, maka perusahaan wajib mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang telah dipatuhi SAK-EMKM. Namun, kepatuhan ini hanya dapat ditunjukkan jika perusahaan telah benar-benar memenuhi semua kriteria dalam SAK-EMKM.

Pada akhir tahun 2016, Bank Indonesia berupaya meningkatkan persentase kredit kepada EMKM menjadi 10%, meningkatkan kemungkinan EMKM akan dapat memperoleh status bankable (memenuhi standar perbankan). Salah satu tujuan dari paket kebijakan pemerintah jilid

XII adalah untuk merampingkan proses perizinan yang terlibat dengan EMKM. Exposure Draft SAK-EMKM telah disetujui oleh IAI Financial Accounting Standards Board (DSAK) pada tanggal 18 Mei 2016.

SAK UMUM, berdasarkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional, adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur pencatatan transaksi oleh bisnis dengan tanggung jawab publik utama, seperti emiten di pasar saham Indonesia. SAK-ETAP adalah standar akuntansi yang dibuat untuk organisasi yang tidak ingin memberikan laporan keuangan kepada pelanggan mereka untuk kebutuhan informasi umum. Tujuan dari SAK EMKM adalah untuk mengakomodasi persyaratan pembukuan perusahaan dari semua ukuran.

UMKM memang berkontribusi terhadap perekonomian suatu negara. Meskipun UMKM penting bagi perekonomian Indonesia, sektor teknologi adalah pengecualian. Bahwa Amerika Serikat adalah rumah bagi jumlah UMKM yang lebih banyak daripada perusahaan publik. Setelah krisis mata uang 1997-1998 menjadi jelas bahwa UMKM Indonesia memainkan peran penting dalam membantu menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, UMKM membantu masyarakat mencari pekerjaan, yang menurunkan angka pengangguran. Temuan studi ini menyoroti fakta bahwa sejumlah besar UKM masih belum mengadopsi SAK-EMKM, sistem akuntansi yang hanya melacak arus kas masuk dan keluar, dan mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang SAK-EMKM merupakan hambatan yang signifikan bagi kemampuan UKM untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat.

Siklus akuntansi dan SAK-EMKM digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Temuan tersebut menegaskan bahwa sistem berbasis SAK-EMKM menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Ketika sebuah perusahaan memiliki keahlian manajerial yang tidak memadai, ia mengalami kesulitan memahami lingkungan bisnis dan melihat kemungkinan bisnis

di lingkungan tersebut, yang mengarah pada masalah dengan perencanaan pada umumnya dan perencanaan keuangan pada khususnya. Sistem akuntansi yang tidak teratur tidak dapat dihindari ketika pekerja yang memenuhi syarat kekurangan pasokan. (Rifky, 2018).

Mayoritas masyarakat Indonesia terlibat dalam beberapa aspek ekonomi, dan salah satu aspek tersebut adalah menjalankan UMKM seperti yang sedang diselidiki di sini. Salah satu jawaban atas masalah kemiskinan yang meluas di Indonesia adalah bagi UMKM untuk memainkan peran yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi negara. UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dan strategis bagi pembangunan ekonomi di setiap negara.

Kehadiran mereka yang berkelanjutan sangat penting untuk perluasan prospek bisnis dan penciptaan lapangan kerja baru. Data ekspansi UMKM di Indonesia menunjukkan kenaikan tahunan yang signifikan di sektor ini. Mengelola UMKM memiliki tantangan ketika mencoba mendokumentasikan keberhasilan mereka dalam menggunakan pengukuran dan evaluasi untuk menjalankan bisnis mereka. Manajer UMKM terkadang harus hanya mengandalkan perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran untuk mencatat, sehingga menyulitkan perusahaan-perusahaan ini untuk membentuk kemitraan dengan organisasi lain atau mendapatkan layanan perbankan. Manajer di UMKM seringkali kesulitan untuk menyimpan catatan yang akurat karena ukuran bisnis mereka.

Sejumlah besar UMKM bertanggung jawab atas masalah pencatatan. UMKM diwajibkan, untuk memperbaiki laporan keuangan perusahaan agar dapat bekerja sama dengan pihak eksternal perusahaan. Pernyataan ini berguna untuk meningkatkan jumlah pendanaan yang tersedia untuk UMKM dan terhubung dengan bank untuk menyelesaikan masalah pencatatan operasional di bisnisnya. Akibatnya, UMKM perlu menyajikan akun keuangan yang akurat sesuai dengan norma-norma industri untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan. Upaya

perusahaan untuk tumbuh secara kuantitatif dan kualitatif akan sangat diuntungkan dari pelaporan keuangan yang akurat dan terstandarisasi.

Informasi penting tentang kesehatan keuangan perusahaan dapat diperoleh dari laporan keuangannya. Pemilik dapat menggunakan laporan keuangan sebagai titik referensi untuk menentukan sejauh mana investasi mereka telah terbayar, jumlah uang tunai tambahan yang telah mereka kumpulkan, dan kekuatan relatif dari hak dan tanggung jawab mereka. Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajemen yang dikeluarkan pada setiap akhir periode dan dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang kesehatan dan pertumbuhan bisnis.

Sejak diterapkan pada 1 Januari 2011, SAK-ETAP telah dimanfaatkan oleh SAK untuk mengatur penyajian laporan keuangan bagi UMKM. SAK-ETAP dimaksudkan untuk digunakan oleh organisasi swasta yang terlindung dari pengawasan publik. Ketika datang untuk memberikan laporan keuangan tujuan umum kepada pelanggan eksternal, perusahaan tanpa akuntabilitas publik dapat diabaikan.

Karena keterbatasan waktu dan kurangnya personel, prosedur akuntansi yang disederhanakan menjadi lebih diperlukan. Pembukuan akuntansi dan pelaporan keuangan juga menjadi bagian integral dari UMKM, karena sangat penting bagi pertumbuhan bisnis. Kecamatan di kabupaten Kuningan, misalnya, belum siap untuk melaksanakan laporan akuntansi keuangannya dan karenanya tidak dapat dijadikan contoh dari ranah penyelidikan akademik. UMKM di Jakarta, Bogor, dan Depok sama bumbunya. Sementara semakin banyak perusahaan menyadari perlunya memiliki laporan akuntansi keuangan berkualitas tinggi, masih ada minoritas yang cukup besar yang belum secara aktif mencari bantuan dalam memperluas operasi mereka. Karena begitu sedikit pemilik bisnis UMKM yang memahami SAK-ETAP, penggunaannya untuk

meningkatkan integritas laporan keuangan belum mendapatkan daya tarik. Diperlukan edukasi yang besar bagi pembuat laporan keuangan dengan standar keuangan yang berlaku bagi perusahaan karena sumber daya manusia seringkali salah diasumsikan sebagai salah satu komponen yang berdampak pada laporan keuangan. Kesulitan serupa terjadi ketika membuat laporan keuangan untuk UMKM karena kurangnya keahlian akuntansi di antara tenaga kerja.

Selain itu, penyampaian laporan keuangan penuh dengan beberapa tantangan. Sebagai akibat dari tidak adanya aturan keuangan untuk UMKM, sumber daya manusia yang kurang mampu mungkin mengalami kesulitan membedakan antara properti pribadi mereka sendiri dan properti perusahaan. Fakta bahwa praktis tidak ada pemilik bisnis yang menggunakan gagasan entitas membuat sulit untuk menjaga aset individu berbeda dari yang perusahaan, dan keberadaan SAK-ETAP sebagian besar tidak diketahui oleh operator UMKM, yang keduanya mempersulit tugas menghasilkan laporan keuangan yang akurat.

Perusahaan UMKM membutuhkan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana karena pimpinan dan karyawannya memiliki pemahaman yang terbatas tentang praktik akuntansi saat ini (UMKM).

Aset dan liabilitas dicatat dalam EMKM bersama dengan biaya akuisisi mereka karena merupakan satu-satunya dasar untuk pengukuran. Dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, SAK-EMKM disahkan pada akhir tahun 2016. Salah satu solusi terbaru yang diambil untuk membantu perekonomian adalah SAK-EMKM. (Dedi, 2018).

UMKM adalah hal yang umum di seluruh perekonomian Indonesia. Untuk memahami ekonomi Indonesia, kita harus mempertimbangkan peran yang dimainkan oleh UMKM. Sebagian besar masyarakat Indonesia terlibat dalam UMKM, yang memainkan peran penting

dalam perekonomian negara dengan menghasilkan lapangan kerja baru dan membantu pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran negara.

Selanjutnya, operasional akuntansi yang sangat membantu dalam mengungkap tren atau situasi keuangan pada UMKM tidak terlepas dari aktivitas UMKM. Akibatnya, melacak berapa lama UMKM tertentu telah ada dapat menjadi tugas yang rumit ketika mencoba menilai efektivitas inisiatif UMKM.

Dampak UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan, karena kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dan lapangan kerja. Angka ini mencapai 99,99 persen, sementara lapangan kerja 97,02 persen. Berdasarkan angka-angka ini, jelas bahwa UMKM Indonesia sedang naik daun, dan bahwa dengan manajemen yang baik, bisnis-bisnis ini dapat berkembang dan membantu menopang ekonomi Indonesia.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa pemerintah, bank, dan lembaga keuangan selain masyarakat umum di Indonesia semuanya mendukung UMKM dan potensi mereka untuk berkontribusi pada perekonomian. Namun, masih banyak ruang untuk perbaikan dalam hal penerapan aturan akuntansi dalam laporan keuangan. Akuntansi sederhana adalah semua yang dibutuhkan untuk banyak M&S. Bukti dari lapangan menunjukkan bahwa hanya 4% bisnis yang benar-benar menggunakan standar akuntansi saat membuat laporan keuangan mereka. Jika dibandingkan dengan kontribusi UMKM yang hampir 58 persen terhadap PDB, ini adalah situasi yang agak disayangkan.

Ada banyak orang dan organisasi di Indonesia yang percaya pada potensi UMKM untuk berkontribusi pada perekonomian. Hal ini menandakan bahwa pemerintah menempatkan prioritas pada pertumbuhan UMKM dalam rangka memitigasi dampak krisis ekonomi di Indonesia. Pemerintah telah berupaya mempromosikan UMKM penyedia kredit usaha untuk

terus menyalurkan kredit kepada nasabahnya. Terlepas dari pertumbuhan UMKM yang cepat di Indonesia, pemiliknya memiliki pemahaman yang terbatas tentang akuntansi dan laporan keuangan, terlepas dari peran penting yang mereka mainkan. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan siswa tentang pembukuan dan proses pelaporan keuangan.

UMKM di Indonesia memiliki masalah serius karena terbatasnya jumlah pelaku UMKM dalam hal persyaratan akuntansi dan akuntansi keuangan.. Namun, banyak UKM yang terus gagal dalam implementasi SAK-ETAP karena prosesnya dipandang terlalu sulit.

SAK lain yang disederhanakan, SAK untuk Entitas UMKM, juga dibuat oleh IAI. SAK-EMKM, standar yang dapat menguntungkan sekitar 57.900.000 usaha UMKM di Indonesia, secara resmi diadopsi pada 1 Januari 2018. SAK-EMKM secara substansial kurang kompleks dibandingkan SAK-ETAP, sehingga ideal untuk digunakan oleh UMKM dalam penyusunan laporan keuangan.

SAK-EMKM dimaksudkan untuk menjadi standar bagi UMKM. IAI adalah badan profesional yang mewakili akuntan Indonesia dan bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan standar keuangan ini.

UMKM memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi potensi ini tidak diimbangi dengan kualitasnya karena adanya kegagalan untuk mengumpulkan dan mengungkapkan data keuangan dengan benar. Salah satu kendala mendasar yang dihadapi UMKM ialah penulisan laporan keuangan yang masih mendasar, sebagian besar UMKM hanya mencatat jumlah barang yang diterbitkan dan yang diterima, jumlah barang yang dijual dan dibeli, dan sejumlah utang dan piutang. Sebab, banyak tantangan yang harus diatasi oleh UMKM agar bisa memproduksinya. Salah satu tantangan tersebut adalah kurangnya keterampilan mengenai catatan akuntansi.

Saat mengeluarkan laporan keuangan perusahaan, penting untuk berpikir di luar kotak sambil tetap berpegang pada prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Badan SAK menyetujui rancangan pemaparan ED SAK-EMKM pada pertemuannya pada tanggal 18 Mei 2016, yang dapat membantu meringankan beban penerapan akuntansi pada UMKM. SAK-EMKM dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Dengan menggunakan praktik akuntansi yang baik, UMKM dapat mengukur pertumbuhan dan kesehatan mereka sendiri, mengevaluasi kinerja mereka selama periode waktu tertentu, dan kemudian mendasarkan rencana mereka untuk masa depan pada informasi laporan keuangan mereka.

Seperangkat persyaratan yang lebih tepat untuk laporan keuangan akan membantu pertumbuhan UMKM. Jika UMKM telah menetapkan standar laporan keuangan, lembaga keuangan akan lebih mampu mengevaluasi kelayakan kredit peminjam dan memberikan pinjaman. Agar akses permodalan dari lembaga keuangan lebih mudah, UMKM harus menekankan pentingnya laporan keuangan sesuai dengan SAK-EMKM. (Eko, 2019).

Kewirausahaan individu dan UMK merupakan bagian integral dari pembangunan Indonesia. Warga negara banyak terlibat dalam UMKM, yang memainkan peran penting dalam menghasilkan lapangan kerja dan membantu pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran saat ini. UMKM sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh layanan akuntansi, yang penting untuk melacak dan menganalisis metrik penting termasuk pertumbuhan dan stabilitas keuangan.

Selama tahun 1998, Indonesia dilanda krisis ekonomi parah yang menyebabkan runtuhnya ekonomi negara. Terlepas dari kemerosotan ekonomi yang meluas yang disebabkan oleh krisis mata uang, perusahaan UMKM memiliki peluang untuk mengatasi badai dan muncul sebagai

penyelamat ekonomi. Perusahaan UMKM adalah organisasi padat karya yang sering menggunakan teknologi dasar dan memiliki modal rendah dan kebutuhan keterampilan, di antara karakteristik lainnya. Dalam hal jumlah perusahaan, jumlah orang yang mereka pekerjakan, dan pembangunan ekonomi nasional (yang diukur dengan PDB), UMKM terus berperan penting dalam meningkatkan ekonomi Indonesia (PDB).

Salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan dalam ekonomi Indonesia modern menyangkut UMKM. Pembangunan ekonomi kelas menengah ke bawah secara langsung dibantu oleh ekspansi UMKM. UMKM telah berkontribusi pada perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja baru bagi mereka yang menganggur. Kemampuan UMKM untuk menerima karyawan baru akan berdampak besar pada tingkat pengangguran Indonesia. UMKM adalah mesin yang menggerakkan ekonomi riil karena mengutamakan pertumbuhan sektor yang berhadapan dengan konsumen dan stimulasi produksi dan konsumsi dalam negeri. Industri material ini menciptakan sesuatu dengan nilai utilitarian langsung dan tidak langsung.

Kurangnya 1) pendidikan, 2) kemampuan menyusun laporan keuangan, dan 3) keakraban dengan teknologi informasi semuanya berkontribusi pada kesulitan yang dimiliki UMKM. Memiliki koneksi di luar perusahaan, seperti di bank sangat penting untuk pertumbuhan bisnis, misalnya untuk meningkatkan modal usaha. Bagi bank atau lembaga pemberi pinjaman lainnya untuk menentukan apakah akan memberikan kredit atau tidak, laporan keuangan sering diperlukan. Seiring pertumbuhan perusahaannya, UMKM dituntut untuk melengkapi laporan keuangan yang telah diaudit sesuai dengan kebutuhan industri. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menawarkan landasan pengambilan keputusan ekonomi dengan menganalisis kondisi arus kas perusahaan, keuangan dan kinerja.

FASME dibuat oleh IAI pada pertengahan tahun 2015. (SAK-EMKM). Setelah 1 Januari 2018, SAK-EMKM akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Dengan disahkannya SAK-EMKM ini, usaha kecil termasuk UMKM dibebaskan dari kebutuhan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK umum yang bersangkutan. SAK-EMKM menyederhanakan beberapa persyaratan pelaporan untuk bisnis, sehingga lebih disukai daripada PSAK. Jika dibandingkan dengan SAK-EMKM yang memiliki panjang sekitar 100 halaman, buku ini setebal 182 halaman dan 30 bab merupakan indikator yang jelas dari perbedaan ukuran.

Penelitian ini bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan sistem pencatatan yang sesuai dengan SAK-EMKM yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang digariskan oleh SAK-ETAP. SAK-EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh usaha kecil dan menengah, sebagaimana didefinisikan oleh IAI. Untuk membantu pemilik bisnis menangani operasi kecil dan mengevaluasi seberapa baik kinerja mereka, Dewan IASB mengembangkan SAK-EMKM. (Baiq, 2020).

Berdasarkan konteks harapan dan tujuan IAI untuk merilis SAK-EMKM, peneliti ingin meneliti topik yang ditunjukkan dengan judul penelitian **“LAPORAN KEUANGAN PADA P.I.R.T PRIMA COCO”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, yaitu:

1. “Bagaimana penerapan laporan keuangan P.I.R.T PRIMA COCO berdasarkan SAK-EMKM”?
2. “Bagaimana prinsip SAK-EMKM menginformasikan format laporan keuangan P.I.R.T PRIMA COCO?”

### **1.3 TUJUAN**

Tujuan penelitian berdasarkan definisi masalah yang diuraikan diatas, yaitu:

1. “Untuk menyelidiki dan membantu pelaksanaan laporan keuangan berbasis SAK-EMKM di P.I.R.T. PRIMA COCO pada posisi yang diiklankan.”

### **1.4 MANFAAT**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

#### **1. BAGI AKADEMIS**

Manfaat untuk penyelidikan ilmiah termasuk data tentang bagaimana P.I.R.T. PRIMA COCO menyiapkan akun keuangannya yang dapat digunakan sebagai titik referensi untuk studi di masa depan.

#### **2. BAGI PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN**

Temuan penelitian ini kemungkinan akan memiliki implikasi praktis yang penting bagi P.I. R.T PRIMA COCO dengan memberikan umpan balik mengenai pentingnya pembuatan laporan keuangan berupa laporan keuangan yang tepat berdasarkan SAK-EMKM.